DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN RB)

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	XI
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi III DPR RI
Acara	:	Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana : 1. Laporan Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah 3. Pengambilan Keputusan Tingkat I; dan 4. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan
Hari/Tanggal	:	Rabu, 18 November 2026
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./ Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)
Sekretaris	:	Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	:	1. 4 (tiga) orang Pimpinan dari 4 (empat) orang Pimpinan 2. 30 (tiga puluh) Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi 3. Sdr. Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum/ Wakil Menteri Hukum beserta jajaran 4. Sdr. Marsekal TNI (Purn). Bambang Eko Suhariyanto,S.H., M.H./ Wakil Menteri Sekretaris Negara I beserta jajaran 5. Sdr. Evita Manthovani/Dirjen Kekayaan Negara Kementeian Keuangan beserta jajaran 6. Sdr. Tri Atmojo Sejati/ Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Sekretariat Negara RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada pukul 13.00 WIB oleh Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./ Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Sekretariat Negara RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),terdapat pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibacakan oleh Ketua Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yaitu Dr. H. Habiburokhman., S.H., M.H.

2. Pandangan mini fraksi-fraksi yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi, Sebagai berikut :
   a. Pendapat mini Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Irjen Pol. (Purn) Drs. H Safarudin, M.Ikom (A-249), Anggota Komisi III DPR RI/ Kapoksi F-PDIP Komisi III DPR RI (menyetujui).
   b. Pendapat mini Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh H. Benny Utama., S.H., M.H. (A-276), Anggota Komisi III DPR RI (menyetujui).
   c. Pendapat mini Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Martin D. Tumbelaka (A-144), Anggota Komisi III DPR RI (menyetujui).
   d. Pendapat mini Fraksi Nasdem disampaikan oleh Rudianto Lalo., S.H., M.H. (A-422) Anggota Komsi III DPR RI/ Anggota F-Nasdem Komisi III DPR RI (menyetujui).
   e. Pendapat mini Fraksi PKB disampaikan oleh H. Hasbiyallah Ilyas, S.Ag (A-13) Anggota Komisi III DPR RI (menyetujui).
   f. Pendapat mini Fraksi PKS disampaikan oleh Dr. H.M. Nasir Djamil, M.Si (A-436) Anggota Komisi III DPR RI/ Kapoksi F-PKS Komisi III DPR RI (menyetujui).
   g. Pendapat mini Fraksi PAN disampaikan oleh Endang Agustina, S.Sos., M.H (A-526) Anggota Komisi III DPR RI/ Kapoksi F-PAN Komisi III DPR RI (menyetujui).
   h. Pendapat mini Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Dr. Hinca I.P Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS Anggota Komsi III DPR RI/ Kapoksi F-P Demokrat Komisi III DPR RI (menyetujui).

   Seluruh pandangan mini fraksi-fraksi yang telah menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pembicaraan II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI dan pandangan mini fraksi-fraksi disampaikan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia serta Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai Perwakilan Pemerintah yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

3. Pandangan Pemerintah tentang RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disampaikan oleh Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum/ Wakil Menteri Hukum yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI

4. Penandatanganan Naskah RUU tentang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.yang dilakukan bersama-sama oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara I, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku perwakilan pemerintah yang mewakil Presiden Republik Indonesia

III. KESIMPULAN

Komisi III DPR RI telah menyelesaikan tugas konstitusional yaitu pembicaraan tingkat I/pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya maka, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan diteruskan pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.30 WIB

PIMPINAN DPR RI
WAKIL KETUA,

TTD

PROF. DR. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD., S.H., M.H.
A-134